

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh kedua lembaga yaitu Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan dalam penulisan hokum ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam pembentukan peraturan daerah, serta hambatan-hambatan yang di alami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridi sempiris, untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembentukan peraturan daerah sudah benar karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masih kurang optimal dibandingkan dengan pemerintah daerah karena setiap tahun yang mendominasi rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah. Hambatan yang muncul antara lain: Sumber Daya Manusia dan Tarik Menarik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Kata Kunci: Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Surabaya, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

In the implementation of regional autonomy produced by a region, one of the Regional Regulations (Perda) established by the two institutions namely the Regional Head and the Regional House of Representatives. The problem in writing this law is to know the role of Surabaya City House of Representatives (DPRD) in the formation of local regulations, as well as natural barriers. This research uses empirical juridical research method, to examine and discuss the issues raised concerning the performance of Surabaya City House of Representatives. The results of this study resulted in the conclusion, in the implementation of the legislative function, Surabaya City House of Representatives has been able to involve the community in the process of making local regulations. Mechanisms in the formulation of local regulations are correct because in the implementation is in accordance with the legislation, but in the formulation of the draft local regulations Surabaya City House of Representatives is still less optimal than the local government because every year that dominate the draft local regulation of local government initiatives. Obstacles that arise include: Human Resources and Interest Pull Interest between the Regional Government and the House of Representatives of the City of Surabaya.

Keywords : Function of Establishment of Local Regulation, Surabaya City House of Representatives, Local Regulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Sampling	10
a. Populasi dan Sampel	11
b. Teknik Sampling	11
c. Random Sampling	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	12
1.6.6 Analisa Data	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II BEBERAPA HAL MENGENAI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	16
2.1 Tinjauan tentang peran	16
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	18
2.3 Bupati/Walikota	26
2.4 Pembentukan Peraturan Daerah	29
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA	36
3.1 Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya	36

3.2	Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	37
3.3	Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya	42
3.4	Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama DPRD Kota Surabaya dan Walikota Surabaya dalam jangka 3 (Tiga) Tahun masa sidang terakhir (2014-2016)	46
3.5	Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah.....	51
3.6	Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah Kota Surabaya	55
BAB IV PENUTUP		57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		62
BIODATA PENULIS.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	8
Tabel 2 Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surabaya dari Tahun 2014-2015	47
Tabel 3 Daftar Peraturan Daerah Tahun 2014	47
Tabel 4 Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015	48
Tabel 5 Daftar Peraturan Daerah Tahun 2016	49
Tabel 6 Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kota Surabaya	52